

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Dalam standard pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah: seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Berdasarkan kepada definisi ini, seperti telah dikatakan, ibu-ibu rumah tangga, para mahasiswa, dan anak-anak orang kaya yang sudah dewasa tetapi tidak bekerja, tidak digolongkan sebagai penganggur. Sebabnya adalah karena mereka tidak secara aktif mencari pekerjaan.¹

2. Jenis Pengangguran

a. Pengangguran Disengaja (*Voluntary Unemployment*)

Suatu pengangguran yang terjadi dalam keadaan di mana seseorang mampu untuk bekerja tetapi lebih senang untuk tidak bekerja.

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hal. 472

b. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*)

Pengangguran yang terjadi karena belum adanya titik pertemuan antara permintaan tenaga kerja dan pencari pekerjaan (*demand and supply of labor*).

c. Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*)

Pengangguran pada usaha-usaha yang sangat terpengaruh oleh faktor musim, baik faktor alam maupun faktor artifisial (buatan manusia).

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang bersifat *inheren* dengan struktur ekonomi suatu masyarakat, khususnya sistem atau struktur ekonomi kapitalisme.

e. Pengangguran Tersembunyi (*Disguised Unemployment*)

Pengangguran yang terjadi dalam masyarakat yang lebih mengutamakan perataan kesempatan kerja. Istilah pengangguran yang diciptakan oleh orang Barat ini perlu mendapatkan tinjauan khusus karena menyangkut falsafah dan kebudayaan yang didukung oleh suatu bangsa atau masyarakat. Masyarakat petani di desa misalnya mempunyai sebidang tanah tertentu untuk digarap oleh 3 orang, tapi karena tetangganya ada 10 orang yang menginginkan untuk membantu bekerja, maka ke 10 orang tersebut semuanya diperkerjakannya. Jadi

yang mengalami pengangguran tersembunyi adalah 7 orang, selebihnya 3 orang yang semestinya dibutuhkan.

f. Pengangguran Teknologikal

Pengangguran yang disebabkan karena pergantian teknologi lama dengan teknologi baru yang bersifat penghematan penggunaan tenaga kerja. Di negara-negara dengan industri yang maju, pergantian tenaga manusia dengan tenaga robot pada suatu industri akan jauh lebih cepat dan efisien.²

3. Faktor Penyebab Pengangguran

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan tersebut hanya akan diperoleh jika para pengusaha dapat menjual barang yang mereka akan produksi. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dan perekonomian.

Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang

² Soetrisno, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 1992), hal. 63-

diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agregat ini adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Disamping itu faktor-faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah:

- a. Menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
- b. Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
- c. Ketidaksesuaian di antara ketrampilan pekerja yang sebenarnya dengan ketrampilan yang diperlukan dalam industri.³

4. Dampak Buruk Pengangguran

Salah satu faktor yang penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat dapat maksimum apabila tingkat tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat sehingga mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu ia dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologis yang buruk atas diri penganggur dan keluarganya.

³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 13

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁴

5. Kebijakan Mengatasi Pengangguran

Untuk menghindari efek-efek buruk dari pengangguran, pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Berikut beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran:⁵

a. Tujuan Bersifat Ekonomi

Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama:

- 1) Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru.
- 2) Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.
- 3) Memperbaiki kesamarataan pembagian pendapat.

b. Menyediakan Lowongan Pekerjaan

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan kata lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka

⁴ Ibid., hal. 14

⁵ Ibid., hal. 331

panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan penambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun.

Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi lambat. Dalam masa seperti itu kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran akan meningkat.

c. Meningkatkan Taraf Kemakmuran Masyarakat

Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per-kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian kesempatan kerja yang meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per-kapita.

d. Memperbaiki Pembagian Pendapatan

Pengangguran yang semakin tinggi akan menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak akan memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja tinggi, tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh.

e. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak akan dapat dicapai dengan mudah.

f. Meningkatkan Kemakmuran Keluarga Dan Kestabilan Keluarga

Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Pertama, keluarga tersebut mempunyai kemampuan yang terbatas untuk melakukan perbelanjaan, maka secara langsung pengangguran

mengurangi taraf kemakmuran keluarga. Seterusnya, pengangguran mengurangi kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.

g. Menghindari Masalah Kejahatan

Di satu pihak, pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan, akan tetapi di lain pihak, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk belanja. Terdapat kaitan yang erat antara masalah pengangguran dengan masalah kejahatan, semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi pula masalah kejahatan.

h. Mewujudkan Kestabilan Politik

Pengangguran merupakan salah satu sumber/penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat. Dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tinggi masyarakat seringkali melakukan demonstrasi dan mengemukakan kritik ke atas pimpinan-pimpinan pemerintah. Hal-hal seperti ini akan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin memburuk.

B. Konsep Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi.⁶

a. Kenaikan harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada periode sebelumnya, perbandingan harga juga dilakukan berdasarkan patokan musim.

b. Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan berdampak inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik.

c. Berlangsung terus-menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan menimbulkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam satu bulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan

⁶ Ekawarna dan Fachruddiansyah Muslim, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), hal. 252

terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulanan dan tahunan.

2. Jenis Inflasi

a. Berdasarkan tingkat keparahannya, tingkat inflasi dibedakan menjadi empat macam, yaitu:⁷

- 1) Inflasi ringan, inflasi yang laju pertumbuhannya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini wajar terjadi pada negara-negara berkembang yang sedang dalam proses pembangunan.
- 2) Inflasi sedang, inflasi yang laju pertumbuhannya berkisar 10% sampai 30% per tahun. Tingkat inflasi sedang dapat membahayakan perekonomian suatu negara.
- 3) Inflasi berat, inflasi yang laju pertumbuhannya sebesar 30% sampai 100% per tahun. Pada tingkat ini, mekanisme harga sulit untuk dikendalikan.
- 4) Inflasi sangat berat, inflasi yang laju pertumbuhannya lebih dari 100% per tahun. Tingkat inflasi ini merupakan yang paling parah.

⁷ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), hal.

b. Berdasarkan sebabnya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁸

1) *Demand-pull Inflation*

Inflasi jenis ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif: pembelanjaan masyarakat terlalu besar atau terlalu cepat sehingga tidak dapat dilayani oleh dunia usaha. Karena permintaan masyarakat yang berlebihan maka keseimbangan antara *supply* dan *demand* terganggu sehingga harga-harga mengalami kenaikan. Permintaan masyarakat ini didukung oleh uang atau kredit yang disediakan oleh dunia perbankan dan pemerintah, tetapi dapat juga dari uang tabungan yang diaktifkan kembali tanpa adanya tambahan uang/kredit oleh dunia perbankan.

2) *Cost-push Inflation*

Jenis inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mendorong harga-harga ke atas. Jenis inflasi ini disebabkan antara lain:

- a) Karena kenaikan harga bahan baku, misalnya BBM, tarif dasar listrik, permainan dengan harga kertas, harga semen, dan sebagainya.
- b) Karena kenaikan kurs valuta asing yang menyebabkan harga semua barang impor naik.

⁸ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2004), hal. 204

- c) Karena kenaikan upah/gaji, kenaikan gaji pegawai negeri yang diikuti oleh perusahaan swasta pula, maka harga- harga lainnya segera ikut naik,
 - d) Suatu bentuk khusus *cost-push inflation* adalah yang disebut dengan *imported inflation* artinya inflasi karena ketularan dari luar negeri. Jenis inflasi ini banyak dialami oleh negara-negara berkembang yang sebagian besar dari usaha produksinya di hampir semua sektor industri mempergunakan bahan dan alat yang masih harus diimpor dari luar negeri.
- c. Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁹

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri

Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

⁹ Bambang Wijayanta dan Aristanti Widyaningsih, *Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 113

Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.

3. Teori Inflasi¹⁰

a. Teori Kuantitas

Teori ini merupakan persamaan dari Irving Fisher dengan formulasi:

$$MV = PQ$$

Persamaan dari Irving Fisher yang menjadi penyebab naiknya harga barang adalah sebagai berikut:

- 1) Jika dalam perekonomian jumlah uang beredar (M) dan jumlah produksi relative tetap, maka harga (P) akan naik jika sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat maka harga-harga akan naik.
- 2) Jika dalam perekonomian (V) dan jumlah produksi (Q) tetap maka kenaikan bharga disebabkan oleh terlalu banyaknya uang yang dicetak-edarkan ke masyarakat.
- 3) jika dalam perekonomian jumlah (M) dan (V) tetap maka kenaikan harga disebabkan oleh turunnya jumlah produksi secara nasional.

b. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini

¹⁰ Amalia Nuril Hidayati, *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Kurs terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No. 01, 2014, hal. 78

menyoroti bagaimana perebutan rezeki antar golongan masyarakat bisa menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar dari pada jumlah barang yang tersedia ($I > S$). Selama gap inflasi masih tetap ada maka besar kemungkinan inflasi dapat terjadi apabila kekuatan-kekuatan pendukung dalam perekonomian tidak digalakkan.

c. Teori Struktural

Teori ini mengatakan sebab inflasi berasal dari kelakuan struktur ekonomi, khususnya ketegaran suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Sebab-sebab struktural menyebabkan pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat dibanding dengan pertumbuhan kebutuhan, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah.

4. Teori Inflasi Menurut Islam

Seorang ekonom Islam yaitu Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M-1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu:¹¹

a. *Natural Inflation*

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 140

Sesuai dengan namanya, jenis inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegah). Ibn al-Maqrizi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat.

Jika memakai perangkat analisis konvensional yaitu persamaan identitas:

$$MV=PT=Y$$

di mana : M = jumlah uang beredar

V = kecepatan peredaran uang

P = tingkat harga

T = jumlah barang dan jasa

Y = tingkat pendapatan nasional

maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya T turun sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya P naik.
- 2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan M turun sehingga V dan T tetap maka P naik.

Lebih jauh jika dianalisis dengan persamaan:

$$AD=AS$$

dan:

$$AS=Y$$

$$AD=C+I+G+(X-M)$$

di mana: Y = pendapatan nasional

C = konsumsi

I = investasi

G = pengeluaran pemerintah

(X-M) = *net export*

maka:

$$Y = C+I+G+(X-M)$$

maka *natural inflation* dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan sebagai berikut:

- 1) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga *net export* nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naiknya permintaan agregat.
- 2) Akibat dari turunnya tingkat produksi karena terjadinya paceklik, perang ataupun embargo dan *boycott*.

b. *Human Error Inflation*

Inflasi ini merupakan akibat dari kesalahan oleh manusia itu sendiri. *Human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebabnya sebagai berikut:

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk
- 2) Pajak yang berlebihan
- 3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan

5. Faktor Penyebab Inflasi

Kenaikan harga umum yang disebut inflasi, yang dikaitkan dengan terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang dapat berasal dari empat faktor:

- a. Segi produksi atau arus barang (*segi supply*). Misalnya karena adanya perang, panen gagal, terjadinya bencana, kemacetan transportasi, perubahan teknik produksi, dan sebagainya.
- b. Segi permintaan (*demand*), kelebihan atau kekurangan permintaan masyarakat, misalnya karena adanya perubahan selera konsumen, karena perubahan tingkat investasi akibat perkembangan teknologi, karena defisit APBN, ekspor yang lebih besar atau lebih kecil daripada impor, karena pandangan pengusaha yang optimis atau pesimis. Ini semua mempengaruhi permintaan dan pembelanjaan masyarakat.

- c. Segi harga, misalnya karena kenaikan gaji pegawai negeri, yang disusul oleh kenaikan harga dan tingkat upah di sektor swasta. Juga karena kenaikan harga bahan-bahan dasar, misalnya karena penetapan harga BBM yang segera merambat ke semua sektor lain, penetapan kenaikan tarif pengangkutan umum, tarif dasar listrik, dan sebagainya. Juga karena kenaikan kurs valuta asing yang mempengaruhi harga semua barang impor dan menjalar ke semua sektor lainnya, juga yang tidak ada hubungannya dengan impor.
 - d. Segi uang, misalnya karena ekspansi jumlah uang beredar oleh pengeluaran pemerintah yang lebih cepat daripada yang dapat diserap oleh dunia usaha dan masyarakat.¹²
6. Akibat Inflasi
- a. Dalam masa inflasi, masyarakat cenderung enggan untuk menabung, dan juga enggan untuk pegang uang kas, sebab nilai riil uang terus merosot. Orang-orang kaya lebih suka menyimpan kekayaannya dalam bentuk barang. Hal ini mendorong munculnya spekulasi perdagangan dan dapat menciptakan inflasi yang jauh lebih hebat lagi.
 - b. Adanya kenaikan harga umum juga akan menyebabkan biaya produksi meningkat, dengan akibat harga-harga barang ekspor menjadi mahal sehingga ekspor makin sulit bersaing di pasar internasional. Sebaliknya impor relatif murah, yang mendorong untuk memperbesar impor, hal

¹² Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...* hal. 203

mana memberatkan neraca pembayaran dan merugikan produsen dalam negeri.

- c. Inflasi menyebabkan nilai riil uang merosot, akibatnya orang yang berpenghasilan tetap, daya belinya terus merosot. Demikian pula orang yang meminjamkan uang dirugikan, sebab pada saat jatuh tempo mereka akan menerima kembali uang mereka dengan nilai riil lebih rendah. Jika kerugian ini ingin diimbangi dengan bunga yang tinggi, maka suku bunga menjadi mahal, yang pada gilirannya akan menghambat investasi.
- d. Dalam masa inflasi kenaikan harga untuk bermacam-macam barang tidak berjalan dengan laju yang sama. Hal ini menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki faktor produksi atau barang yang mengalami kenaikan harga tertinggi. Dalam keadaan inflasi, mereka yang kaya akan jauh lebih bertahan daripada mereka yang miskin, dengan kata lain yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dengan demikian inflasi memperburuk distribusi pendapatan di antara masyarakat dan menjauhkan tercapainya keadilan sosial.¹³

7. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Inflasi dapat diatasi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Apabila ingin menekan laju inflasi melalui kebijakan moneter maka tindakan yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang atau peredaran uang. Instrumen yang populer digunakan oleh instrumen moneter adalah menaikkan suku bunga. Tindakan ini akan mengurangi para

¹³ Ibid., hal. 206

penanam modal untuk mengurangi kegiatan investasinya. Sehingga mengurangi peredaran uang di masyarakat dan daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian harga atau laju inflasi dapat ditekan.

Jika pemerintah ingin mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal maka pemerintah dapat menggunakan dua instrumen utamanya melalui belanja pemerintah dan pajak. Melalui pembelanjanya pemerintah dapat mengurangi pengeluarannya agar peredaran uang dapat dikurangi di masyarakat sehingga permintaan atau daya beli masyarakat berkurang. Dengan demikian laju inflasi dapat ditekan. Melalui pajak, pemerintah dapat menekan laju inflasi dengan menaikkan pajak. Dengan dinaikkannya pajak maka uang di tangan masyarakat dapat ditarik ke tangan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat berkurang.¹⁴

C. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas berada di bawah satu garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang layak. Pengertian lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *European*

¹⁴ Zakaria, *Pengantar Teori Ekonomi Makro...*, hal. 66-67

Union bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya yang sangat terbatas.¹⁵

2. Macam-macam Kemiskinan

a. Kemiskinan Subjektif¹⁶

Kemiskinan subjektif adalah kemiskinan yang berlaku secara individual, Kemiskinan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sejumlah harta maupun dengan kemampuan mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan. Kemiskinan subjektif itu berhubungan dengan perasaan. Seseorang dikatakan miskin jika dirinya merasa miskin dan dikatakan kaya jika dirinya merasa kaya, bukan karena orang lain yang mengatakannya. Tidak peduli berapa banyaknya harta, jika ia merasa belum cukup dan masih banyak kebutuhannya yang belum terpenuhi, sebenarnya dia itu miskin. Para ahli hikmah menyebut itulah kaya hakiki dan miskin hakiki. Kemiskinan subjektif tidak dapat diukur, dan hanya bisa dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Meskipun mengandung kebenaran, kemiskinan subjektif tidak dapat dianalisis.

¹⁵ Ali Khomsan, *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*, (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2017), hal. 9

¹⁶ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 146

b. Kemiskinan Objektif

Kemiskinan objektif berhubungan dengan pandangan orang lain. Maksudnya, seseorang dikatakan miskin karena orang-orang memang memandang orang tersebut tidak mempunyai, dan seseorang dikatakan kaya karena orang banyak melihatnya kaya.

Kemiskinan objektif dibagi menjadi dua macam yaitu:

1) Kemiskinan mutlak

Seseorang disebut miskin mutlak apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (*property line*) untuk Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sejumlah uang yang dipakai untuk membeli 21.000 kalori setara beras sehari per orang.

2) Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif menyatakan kemiskinan dalam perbandingan dengan keadaan seseorang atau suatu kelompok lain. Jelasnya, seseorang atau kelompok disebut miskin relatif jika dia lebih miskin dari orang atau kelompok lain.

c. Kemiskinan Struktural¹⁷

Kemiskinan struktural menunjuk pada ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang menghalanginya.

d. Kemiskinan Sosial Budaya

Kemiskinan ini disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, misalnya pandangan masyarakat terhadap nilai kerja, terhadap waktu, dan terhadap alam sekitar dapat menyebabkan masyarakat tertinggal.

3. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

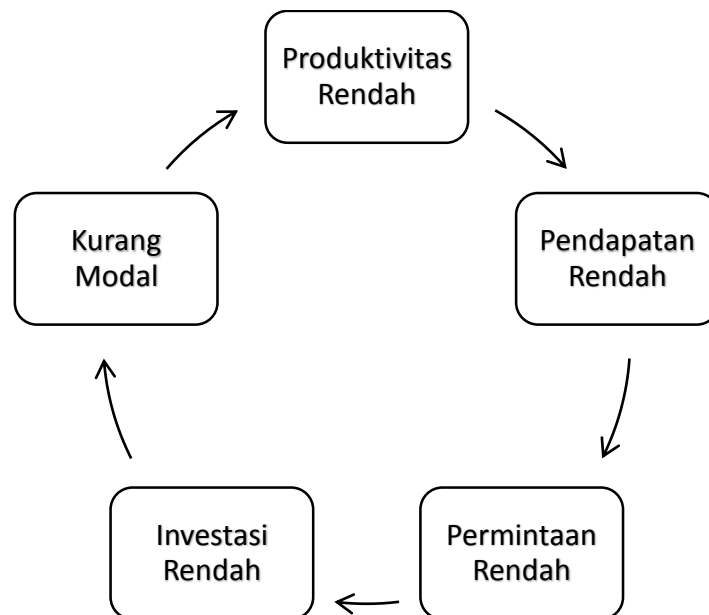
Negara terbelakang umumnya terjat ke dalam apa yang disebut “lingkaran setan kemiskinan”. Nurkse menjelaskan “lingkaran setan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain bereaksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya, selalu kurang makan; karena kurang makan, kesehatannya memburuk; karena fisiknya lemah kapasitas kerjanya rendah; karena kapasitas kerjanya rendah penghasilannya pun rendah, dan itu berarti ia miskin, akhirnya ia tidak akan mempunyai cukup makan; dan seterusnya. Bila keadaan seperti ini

¹⁷ Gilarsa, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*...hal. 327

dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas dalam dalil kuno: ‘suatu negara miskin karena ia miskin’.

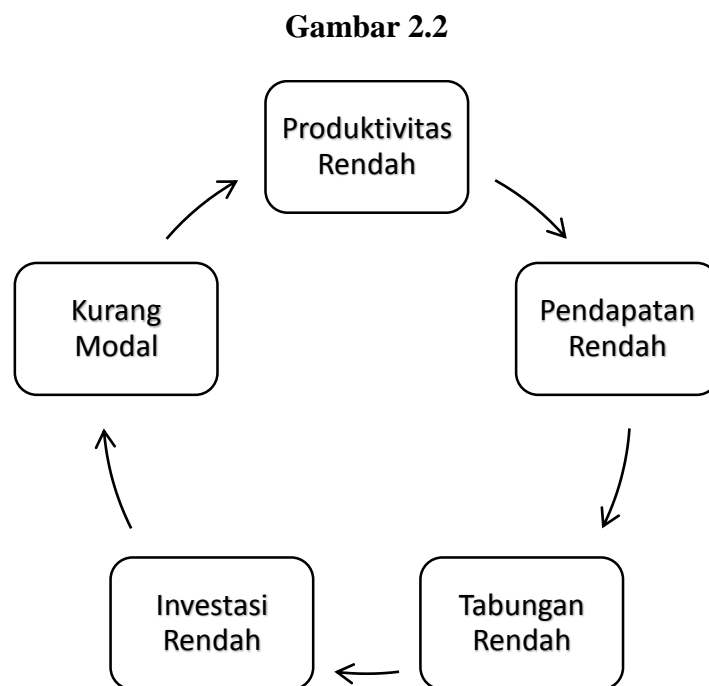
Lingkaran setan pada umumnya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan jika dilihat dari sudut permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut: rendahnya tingkat pendapatan nyata menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, sehingga pada gilirannya tingkat investasi pun rendah.

Gambar 2.1



Investasi yang rendah menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah, ditunjukkan pada gambar 2.1. Produktivitas rendah

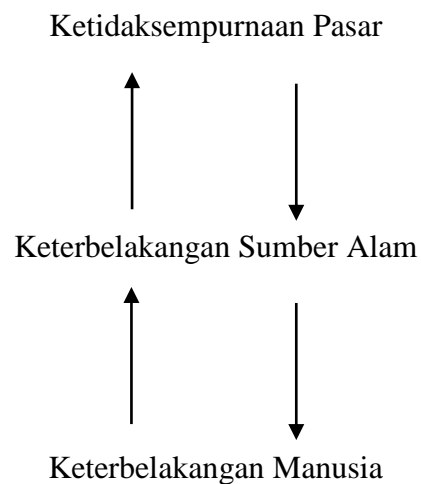
tercermin dalam pendapatan nyata yang rendah sehingga tingkat tabungan juga rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan investasi rendah dan kekurangan modal. Pada dasarnya modal yang rendah akan mengakibatkan produktivitas rendah pula. Dengan demikian lingkaran setan itu lengkaplah pula kalau dilihat dari sudut penawaran. Lingkaran ini dilukiskan dalam gambar 2.2. Tingkat pendapatan rendah, mencerminkan rendahnya investasi dan kurangnya modal merupakan ciri umum kedua lingkaran setan tersebut.



Lingkaran setan yang ketiga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengembangan sumber daya alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya

terbelakang dan buta huruf, minim keterampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas kewirausahaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, keterbelakangan sumber alam ini menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber alam merupakan sebab dan akibat keterbelakangan manusia. Hal ini dijelaskan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3



Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dengan demikian merupakan dua istilah yang sama. Suatu negara dikatakan miskin karena negara tersebut terbelakang. Negara tersebut terbelakang karena ia miskin,

dan tetap terbelakang karena tidak mempunyai sumber yang diperlukan untuk pembangunan.¹⁸

4. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain:¹⁹

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun juga rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses manusia mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang terpaksa saat ini yang dapat dilakukan. Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, sehingga potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kalitas sumber daya manusia, karena jika kualitas sumber daya manusia rendah maka akan mempengaruhi yang lain. Kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan:

¹⁸ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 33-35

¹⁹ Itang, *Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 1, 2015, hal. 7

- 1) Penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
- 2) Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- 3) Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
- 4) Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
- 5) Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

5. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Berbagai upaya mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dalam wujud kebijakan dan program-program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Kebijakan bersifat langsung yaitu berupa program yang langsung diberikan kepada penduduk miskin, seperti bantuan tunai langsung, beras miskin, sedangkan kebijakan tidak langsung seperti program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun telah dilakukan berbagai upaya namun kemiskinan tidak dapat dihilangkan seluruhnya, artinya fenomena kemiskinan dengan mudah dapat dijumpai di hampir seluruh wilayah baik perkotaan maupun pedesaan. Program kemiskinan yang saat ini dilakukan baik pemerintah maupun non pemerintah umumnya hanya

sementara, artinya program tersebut akan berjalan selama masih ada anggaran. setelah anggaran habis maka selesai pula kegiatan tersebut. Dengan kata lain bahwa program-program kemiskinan yang selama ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan projek dan bukan pendekatan program. Tidak heran jika program pengentasan kemiskinan tidak berkelanjutan akhirnya angka kemiskinan tetap tinggi. Tampaknya dalam merumuskan sebuah kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu diberlakukan beberapa tahapan kegiatan. Seperti diawali dengan *assesment*. Dalam tahap ini dilakukan merumuskan atau mengkategorikan dimensi-dimensi dan faktor penyebab kemiskinan, analisis kebutuhan dan potensi yang dapat dikembangkan dan merumuskan bentuk-bentuk program yang diinginkan oleh penduduk miskin. Selain itu dirumuskan pula pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam dalam kegiatan atau program kemiskinan, serta membuat jadwal pelaksanaannya. setelah tahap ini selesai maka dilanjutkan ke tahap pelaksanaan kegiatan dan diakhiri dengan monitoring.

Kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan tentunya dalam implementasi melalui program-program yang berbasis pada penggalian potensi yang ada di masyarakat itu sendiri. Artinya perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam melaksanakan program dan pemerintah berperan sebagai fasilitator. Selain itu juga perlu dirumuskan strategi untuk

keberlangsungan program kegiatan di masyarakat yang didukung dengan koordinasi antara instansi terkait.²⁰

6. Sarana Pengentasan Kemiskinan Menurut Islam

Islam sudah memaklumkan perang melawan kemiskinan, memperketat pengepungan dan mengintensifkan pengintaian sebagai antisipasi terhadap bahaya yang bisa ditimbulkan oleh kemiskinan tersebut. Dari sini kemudian Islam mewajibkan setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak. Paling tidak, cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Secara umum mereka hanya wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memiliki taraf hidup yang sesuai dengan keadaannya, bisa menjadi penolong untuk melaksanakan kewajiban Allah, menanggung dan menjalani beban kehidupan serta bisa melindungi mereka dari keganasan bahaya kemiskinan, keterbengkalaiian dan ketidakcukupan.

Sarana-sarana yang diberikan oleh Islam untuk mengentaskan kemiskinan antara lain:²¹

- a. Sarana yang pertama, hanya khusus untuk fakir miskin. Ia harus ditunaikan ketika seseorang mampu dan memiliki harta kekayaan. Masyarakat dan negara wajib memberikan bantuan material dan dukungan moral sehingga bisa terlaksana dengan baik.

²⁰ Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 01, 2008, hal. 8-9

²¹ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hal. 288

b. Sarana yang kedua, terkait dengan masyarakat Islam secara kolektif yang harus sama-sama peduli terhadap persoalan yang dihadapi fakir miskin. Hal itu berlandaskan hukum wajib dari Tuhan atau karena mengharapkan pahala dari-Nya. Bentuk-bentuk jaminan tersebut antara lain:

- 1) Nafkah untuk anggota keluarga dan kerabat.
- 2) Perlindungan atas hak tetangga.
- 3) Menunaikan zakat yang diwajibkan, sekalipun tidak ada instruksi dari negara Islam.
- 4) Melaksanakan hak-hak yang terkait dengan harta, seperti berbagai bentuk kafarat atau nazar, memberikan bantuan terhadap orang yang berada dalam kondisi darurat, dan lain sebagainya.
- 5) Sedekah suka rela, baik reguler atau permanen, yang salah satu bentuknya berupa wakaf untuk kepentingan umum.

c. Sarana ketiga, terkait dengan negara Islam yang secara normatif-doktriner wajib memberikan jaminan terhadap semua anggota masyarakat yang memerlukan bantuan, sementara ia tidak mendapatkan perhatian dari anggota masyarakat sendiri. Dalam hal ini, tidak ada diskriminasi antara warga negara yang muslim atau non muslim, selama hidup dalam wilayah teritorial negara Islam. Sumber dana untuk kepentingan jaminan ini berasal dari:

- 1) Zakat, yang merupakan sumber dasar permanen untuk kas Islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

- 2) Sumber dana lain, seperti 20% dari *ghanimah*, *fai'*, *kharaj*, *jizyah*, barang-barang tak bertuan, penginggalan tanpa ahli waris, semua sumber ekonomi yang dikuasai oleh negara, dan lain sebagainya.
- 3) Sumber-sumber pendukung, berupa pajak dan berbagai pungutan untuk menambah kekurangan kas. Sumber ini dikenakan kepada orang kaya, untuk merealisasikan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, ketika kas tidak cukup sementara sumber lain tersedia.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai salah satu bahan acuan dari penelitian ini adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang menjadi referensi penyusun adalah sebagai berikut:

1. Syahrullah,²² dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendidikan, pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Variabel dalam penelitian tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, Pengangguran dan Kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB

²² Dio Syahrullah, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2009-2012*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan yang berarti setiap kenaikan tingkat PDRB maka tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan, yang artinya setiap kenaikan tingkat pengangguran maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan.

Persamaan: persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga membahas seberapa jauh pengaruh variabel pengangguran terhadap kemiskinan.

Perbedaan: perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lingkup penelitian dan jumlah variabel yang diteliti.

2. Irhamini,²³ dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel dalam penelitian tersebut adalah Jumlah Penduduk, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah dan Kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi. Data yang digunakan berupa data sekunder. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan yang berarti setiap kenaikan jumlah penduduk dan pengangguran maka tingkat kemiskinan juga akan mengalami kenaikan. Variabel pengeluaran pemerintah

²³ Irhamini, "*Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015*", Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti setiap kenaikan pengeluaran pemerintah maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

Persamaan: persamaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga membahas seberapa jauh pengaruh variabel pengangguran terhadap kemiskinan.

Perbedaan: perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lingkup penelitian dan jumlah variabel yang diteliti.

3. Rohani,²⁴ dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Inflasi dan Kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti setiap kenaikan pertumbuhan penduduk dan inflasi maka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti setiap kenaikan

²⁴ Rohani, "*Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016

pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan akan mengalami penurunan.

Variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga membahas seberapa jauh tingkat pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan.

Perbedaan: perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lingkup penelitian dan jumlah variabel yang diteliti.

4. Putri,²⁵ dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh inflasi, pengangguran, dan demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah Inflasi, Pengangguran, Demokrasi, dan Kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel analisis random effect model. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi, pengangguran dan demokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan yang berarti setiap kenaikan inflasi, pengangguran, dan demokrasi maka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan.

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga membahas seberapa jauh tingkat pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan.

Perbedaan: perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lingkup penelitian dan jumlah variabel yang diteliti.

²⁵ Eka Sulistiana Putri, “*Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Demokrasi terhadap Kemiskinan di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

5. Dwiphasari,²⁶ dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan berupa data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan.

Persamaan: persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini juga membahas seberapa jauh tingkat pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan.

Perbedaan: perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lingkup penelitian dan jumlah variabel yang diteliti.

E. Kerangka konseptual

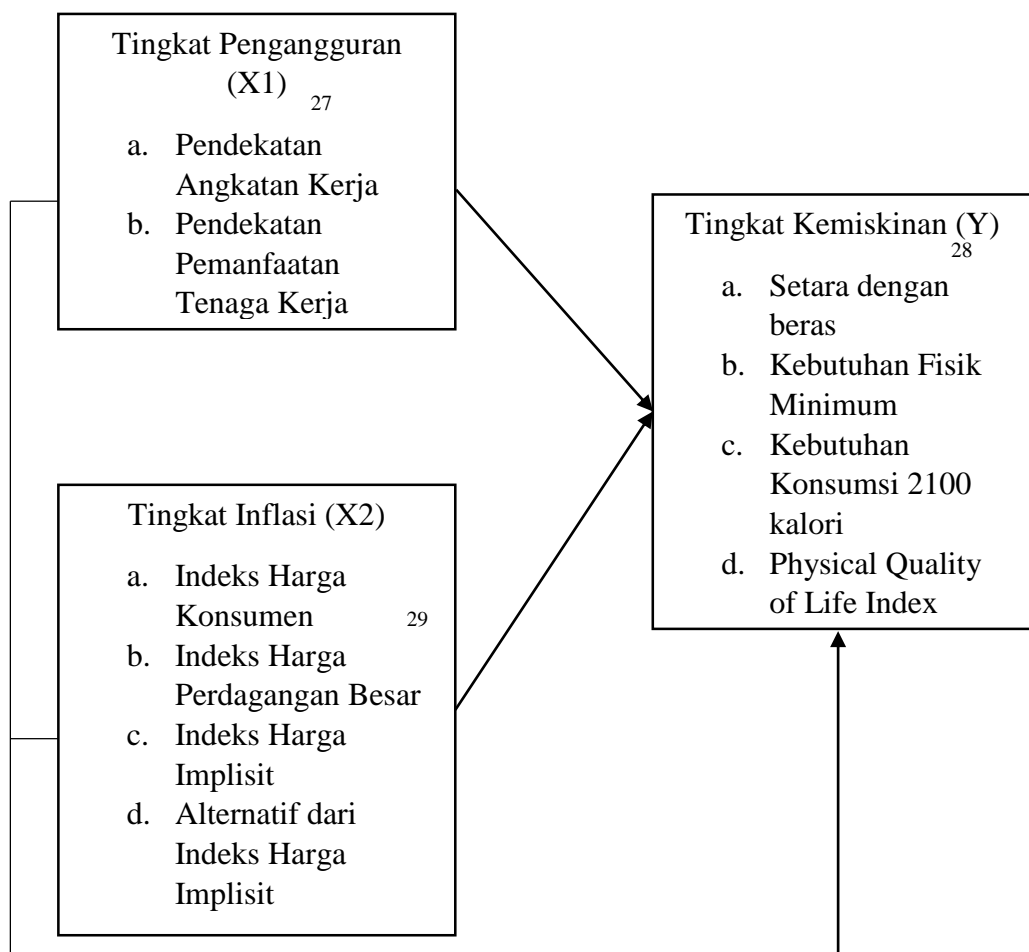
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dibentuk dari adanya saling ketergantungan antar variabel yang penting untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel Tingkat Pengangguran (X1), Tingkat Inflasi (X2), Tingkat Kemiskinan (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran dan tingkat inflasi terhadap tingkat

²⁶ Yulianita Ratna Dwiphasari, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia 2000-2015*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2017. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Konseptual



²⁷ Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 18

²⁸ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro...* hal. 328

²⁹ Ekawarna, *Pengantar Teori Ekonomi Makro...*, hal. 258

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H2 : Tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

H3 : Tingkat pengangguran dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.